

# Evaluasi Penggunaan Baliho Sebagai Media Kampanye Dalam Perspektif Sila Kedua Pancasila

**Andini Yurisna; Nur Amalina Sabrina; Keisha Jovie Dermawan; Greycia Febrina Michele; Mustika Bunga S; Universitas Pradita, [greycia.febrina@student.pradita.ac.id](mailto:greycia.febrina@student.pradita.ac.id)**

*ABSTRACT: The use of billboards as a political campaign medium has become an integral part of the democratization process in Indonesia. However, a thorough evaluation of the effectiveness and impact of billboard usage is still minimally conducted. This study aims to explore future strategies and practical solutions in using billboards as a campaign medium within the context of the second principle of Pancasila. One of Pancasila's core values, namely fair and civilized humanity, demands fair and civilized attitudes in social interactions. This research employs a qualitative analysis approach with a literature review method to elucidate the significance of billboard usage in political contexts and Pancasila values. The research findings indicate that billboards can be an effective communication tool if used in a manner that respects diversity and inclusivity. In the context of political campaigns, billboards designed with clear messages and reflecting the values of justice can enhance public awareness and support a more inclusive political agenda. This study is expected to provide better insights into the effectiveness of billboards in conveying messages of social justice and to identify more effective future strategies in utilizing billboards as a political campaign tool. Additionally, the research results also advocate for the use of billboards in more interactive and innovative formats, such as integrating digital technology, to enhance voter engagement and provide more relevant and timely information to the wider community.*

*KEYWORDS: Billboards, Pancasila, Political Campaign, Humanity, Fairness*

**ABSTRAK:** Penggunaan baliho sebagai media kampanye politik telah menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namun, evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan dampak penggunaan baliho masih minim dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi masa depan dan solusi praktis dalam penggunaan baliho sebagai media kampanye dalam konteks sila kedua Pancasila. Salah satu nilai utama Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut sikap adil dan beradab dalam interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menguraikan makna penggunaan baliho dalam konteks politik dan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baliho dapat menjadi alat komunikasi yang efektif jika digunakan dengan cara yang menghormati keragaman dan inklusivitas. Dalam konteks kampanye politik, baliho yang dirancang dengan pesan yang jelas dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendukung agenda politik yang lebih inklusif. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik tentang efektivitas baliho dalam menyampaikan pesan-pesan keadilan sosial serta mengidentifikasi strategi masa depan yang lebih efektif dalam memanfaatkan baliho sebagai sarana kampanye politik. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendorong penggunaan baliho dalam format yang lebih interaktif dan inovatif, seperti dengan integrasi teknologi digital, untuk meningkatkan keterlibatan pemilih dan menyediakan informasi yang lebih relevan dan tepat waktu kepada masyarakat secara luas.

**KATA KUNCI:** Baliho, Pancasila, Kampanye Politik, Kemanusiaan, Adil

## I. PENDAHULUAN

Penggunaan media massa dalam menyampaikan pesan kampanye sosial atau politik telah menjadi elemen integral dalam proses demokratisasi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, baliho, sebagai salah satu bentuk interaksi media massa yang paling sering digunakan dalam musim kampanye, terbukti efektif dalam mencapai audiens yang luas dan menyampaikan pesan secara visual yang membangkitkan kesadaran. Baliho adalah gambar orang yang sering kita lihat, terutama saat kita melewati jalan akan membekas dan terbayang, minimal kita akan mengenali namanya serta logo partai yang tercantum (Lukmanul Hakim, 2021).

Baliho kandidat adalah jenis media periklanan yang digunakan oleh kandidat anggota parlemen untuk meningkatkan visibilitas mereka dan menyampaikan pesan politik kepada calon pemilih. Dengan menampilkan wajah dan nama calon anggota parlemen, baliho tersebut berupaya menarik perhatian masyarakat dan memberikan kesan yang kuat kepada pemilih. Penggunaan baliho bergambar wajah calon anggota parlemen di jalan dapat memberikan dampak positif, misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap calon anggota parlemen yang mencalonkan diri. Melalui baliho tersebut, pemilih dapat mengenal kandidat pemilu dan programnya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu (Kompasiana).

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan baliho sebagai media kampanye politik atau sosial semakin meningkat di Indonesia. Namun, evaluasi mendalam terhadap efektivitas penggunaan baliho masih minim dilakukan. Meskipun baliho dianggap sebagai media yang efektif dalam kampanye, sudah banyak tragedi yang disebabkan baliho-baliho kampanye. Sebagai contoh, terjadinya kasus kecelakaan yang disebabkan oleh baliho kampanye yang menimpa 3 orang siswi SMK hingga tewas, penempatan baliho dengan cara dipaku di pohon perindang di jalan-jalan maupun tempat umum lainnya yang menyebabkan polusi mata, penurunan baliho meninggalkan kayu berserakan di tepi jalan, pencemaran lingkungan karena limbah baliho yang sulit terurai, dan pemasangan baliho yang tidak mendapat izin.

Pelanggaran dan kerugian yang disebabkan baliho sudah marak terjadi, namun baliho masih terus digunakan sebagai media kampanye.

Salah satu nilai utama Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menekankan pentingnya sikap adil dan beradab dalam interaksi antar manusia. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan, hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun, golongan manusia yang berkuasa tidaklah diperkenankan memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan hak seseorang.

Mematuhi peraturan-peraturan mengenai pemasangan baliho merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai sila kedua Pancasila. Penempatan baliho yang sembarangan dan tanpa izin telah membahayakan masyarakat, merusak lingkungan, dan merampas hak milik masyarakat hal ini telah melanggar nilai sila kedua Pancasila yang mengedepankan sikap adil dan beradab dalam interaksi sesama masyarakat. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk meneliti dan menginvestigasi strategi masa depan dan solusi praktis dalam penggunaan baliho sebagai media kampanye dalam konteks sila kedua Pancasila.

Selain itu, penting untuk mengevaluasi penggunaan baliho sebagai media kampanye di era yang teknologinya semakin berkembang, serta dinamika sosial-politik yang terus berubah. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memahami sejauh mana baliho efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keadilan sosial, tetapi juga untuk mengidentifikasi strategi masa depan dan solusi praktis dalam memanfaatkan baliho sebagai sarana yang lebih efektif dalam mendukung sila kedua Pancasila.

Dengan demikian, penelitian evaluatif terhadap penggunaan baliho sebagai media kampanye dalam konteks sila kedua Pancasila menjadi relevan untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi masa depan yang lebih efektif dalam penggunaan baliho sebagai media kampanye. Hal ini termasuk mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat, pelatihan bagi praktisi kampanye, penggunaan teknologi untuk memonitor dan mengelola

baliho secara efisien, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

## II. METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu pencarian data dan informasi melalui sumber-sumber teks seperti artikel ilmiah, buku, dan riset terkait di internet. Metode penelitian studi kepustakaan adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber teks yang sudah ada, seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan riset terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi langsung atau kuesioner, tetapi lebih fokus pada analisis terhadap literatur yang sudah ada. Tujuan utama dari metode studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber untuk mendukung pembahasan dan analisis dalam penelitian (Mestika Zed, 2003). Selanjutnya, data yang terkumpul akan digunakan untuk menganalisis literatur terkait penggunaan media kampanye, khususnya baliho, dalam konteks politik dan nilai-nilai Pancasila.

Peneliti menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau peristiwa secara mendalam melalui interpretasi dan penguraian makna dari data yang dikumpulkan (Sumarsono, 2020). Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan lebih fokus pada pemahaman tentang konteks, proses, dan pola yang mendasari fenomena yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan analisis kualitatif akan digunakan untuk mengurai makna yang terkandung dalam berbagai sumber literatur yang relevan dengan penggunaan baliho sebagai media kampanye politik dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini akan meneliti berbagai aspek terkait penggunaan baliho, seperti efektivitasnya dalam menyampaikan pesan politik, dampak sosial-politiknya, dan kaitannya dengan prinsip-prinsip Pancasila. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menguraikan makna yang terkandung dari berbagai sumber.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Prinsip Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila**

Sila kedua Pancasila adalah "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang merupakan landasan moral bagi bangsa Indonesia. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan yang memiliki arti bahwa manusia memiliki derajat yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Penerapan dari sila kedua adalah untuk memberikan pemahaman kepada manusia untuk bersikap adil dan beradab. Makna sila kedua Pancasila:

- Kesadaran

Sila kedua menunjukkan pentingnya kesadaran individu terhadap nilai-nilai moral dan kebutuhan hati nurani sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang bermartabat yang meliputi pengakuan akan hakikat kemanusiaan, keadilan, dan sikap beradab dalam interaksi sosial. Ini menandakan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek kehidupannya.

- Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kebebasan berpendapat, hak atas lingkungan hidup sehat, hak atas kesejahteraan dan keamanan, hak atas ruang publik, dan hak atas kebebasan berekspresi. Hak-hak ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir, tanpa diskriminasi apapun, dan diakui oleh hukum, norma sosial, dan prinsip-prinsip moral. Sila kedua menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap HAM antar individu. Selain itu, pengakuan terhadap HAM juga mencakup tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut serta memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa hambatan. Hal ini mencakup penyediaan sistem hukum yang adil dan efektif, serta kebijakan publik yang memperkuat perlindungan terhadap HAM.

- Kemanusiaan

Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya pengembangan sikap saling mencintai sesama manusia atas dasar kemanusiaan. Makna ini merujuk pada prinsip bahwa sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan sesama dengan kasih sayang, empati, dan penghargaan atas martabat mereka sebagai manusia. Dengan mempraktikkan sikap saling mencintai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan sejahtera bagi semua. Hal ini tidak hanya berdampak pada pengurangan tindak kejahatan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan.

- Keadilan

Sila kedua Menekankan pentingnya menerapkan kehidupan yang adil dan beradab di dalam masyarakat. Pemahaman akan makna ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan perlakuan di antara semua individu dalam masyarakat. Penerapan keadilan sosial melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk distribusi kekayaan, kesempatan dalam pendidikan dan pekerjaan, akses terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, serta partisipasi dalam proses politik dan pembuatan keputusan. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil.

- Tenggang Rasa

Pemahaman akan sila kedua Pancasila, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat memberikan dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling hormat menghormati dalam hubungan sosial. Konsep tenggang rasa ini mengacu pada sikap saling menghargai, menghormati, dan memperlakukan sesama dengan penuh pengertian dan empati, tanpa memandang perbedaan atau kepentingan pribadi. Pemahaman akan sila kedua Pancasila dan konsep tenggang rasa

sebagai implementasinya menggambarkan betapa pentingnya memelihara hubungan sosial yang harmonis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi zaman yang kacau, dengan ledakan populasi manusia yang tidak terkendali, serta ketidakseimbangan dalam berbagai aspek, telah mendorong urgensi akan perlunya pemulihan kemanusiaan yang kuat dengan nilai-nilai yang mampu membimbing manusia untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Oleh karena itu, istilah "visioner" sangat sesuai untuk menggambarkan sila kedua Pancasila ini sebagai respons terhadap penurunan moral dan kebutuhan yang mendesak akan pengembangan kemanusiaan di masa depan yang terus berlangsung. (Meindia Bintang).

## **B. Efektivitas Penggunaan Baliho**

Kampanye politik merupakan kegiatan yang dimaksudkan agar mendapat dukungan, baik secara personal maupun kelompok, yang dimaksudkan di sini adalah perseorangan politisi atau sebuah kelompok partai politik. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai cara dan berbagai media, seperti mendatangi pemukiman warga secara langsung, melakukan kegiatan sosial, hingga memasang iklan. Salah satu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para politisi atau partai politik adalah dengan cara memasang iklan. Baik iklan tentang partai politiknya, maupun iklan yang menampilkan pribadi politisi itu sendiri.

Salah satu tujuan dalam pemasangan iklan politik adalah untuk pencitraan (Chaarnaillan, Firdaus, & Nasution, 2018). Pada iklan tersebut, mereka berusaha untuk menyampaikan tujuan politik, menonjolkan kelebihan mereka, atau sekedar memperkenalkan diri mereka. Kampanye melalui iklan dianggap lebih efektif karena iklan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dibanding kampanye dengan cara mendatangi suatu pemukiman warga. Media yang digunakan dalam memasang iklan terdapat beberapa macam, diantaranya yakni melalui iklan elektronik, media cetak, audio, dan lain-lain.

Salah satu jenis media yang digunakan para politisi dan partai politik untuk berkampanye adalah baliho atau billboard. Baliho merupakan lembaran plastik atau kain berukuran besar kurang lebih 3×4 meter yang berbentuk vertikal, biasanya terbuat dari bahan vinyl atau stiker PVC (Purnengsih, 2017). Baliho biasanya terletak di luar, tepatnya di lokasi yang mungkin dilihat atau ditemui banyak orang. Selain itu, karena ukurannya yang cukup besar, baliho dinilai cukup efektif sebagai media pemasangan iklan. Baliho berbentuk gambar atau teks yang memuat informasi tentang pesan yang diiklankan.

Banyak partai politik atau politisi secara perseorangan menggunakan baliho sebagai media mereka dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pemanfaatan baliho sebagai media penyebaran informasi politik merupakan saluran informasi yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap calon pemilih di masa depan (Ali, 2013).

Salah satu cara bagaimana suatu baliho mampu menarik perhatian audiens yang melihatnya adalah dengan menampilkan gambar atau visual yang berbeda, lebih menarik, dan lebih menonjol dibandingkan dengan iklan lain yang sejenis. Apalagi, biasanya di sepanjang jalan, banyak iklan-iklan sejenis yang juga bersaing dalam menarik perhatian audiens atau masyarakat yang melihatnya.

Berdasarkan studi yang dilakukan BMI Research, konsumsi iklan di masyarakat perkotaan Jabodetabek mencapai 81% jika promosi di luar ruangan diperhitungkan. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan iklan televisi yang mencapai 83%, namun masih lebih tinggi dibandingkan media online yang mencapai 55%, dan media cetak yang hanya mencapai 20% (Ratnasari, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa baliho yang merupakan salah satu media iklan luar ruangan masih cukup efektif dibanding media iklan lainnya. Dinilai lebih bisa menjangkau masyarakat luas serta cukup efektif sebagai media iklan, banyak partai politik dan politisi menggunakan baliho atau billboard untuk memasang iklan mengenai partai mereka.

Disamping dari bagaimana tingkat keefektifitasan penggunaan baliho yang cukup tinggi, sayangnya banyak dari para politisi dan partai

politik menggunakan kesempatan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam konteks Indonesia, kode etik peserta pemilu didasarkan pada landasan bernegara yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan kebhinekaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Sekarang ini, keefektifan penggunaan baliho tidak hanya dinilai dari tempat pemasangan yang strategis, namun juga dari nilai keunikan dan kekreatifan yang terkandung dalam baliho. Baliho yang kreatif dan unik di mata masyarakat dapat menjadi bahan perbincangan di sosial media yang artinya dapat memperluas jangkauan promosi. Baliho sudah bukan lagi terkait jumlah atau dimana baliho itu terpasang. Sekarang ini, penempatan baliho yang unik dan kreatif pada lokasi yang strategis dapat mengekspresikan keindahan suatu kota, bukan merusaknya atau bahkan menimbulkan persepsi negatif terhadap baliho dan calon yang diusung dari baliho tersebut.

### **C. Pengaruh Terhadap Masyarakat**

Kehadiran baliho pada masa kampanye memunculkan berbagai opini baik yang pro (mendukung) dan kontra (menentang). Mengapa baliho digunakan? Tujuan dari baliho sebagai media kampanye adalah untuk menarik perhatian masyarakat luas terhadap simbol-simbol yang disampaikan oleh baliho tersebut, seperti logo partai, foto, nama, nomor, visi dan misi, serta slogan. Tujuan pemasangan baliho adalah untuk meningkatkan minat masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memilih calon atau partai yang diusung melalui baliho tersebut.

Pakar komunikasi UI Firman Kurniawan Sujono mengatakan bahwa memang baliho memiliki keunggulan tersendiri. Apalagi di tempat strategis yang banyak orang berlalu lalang, baliho akan menjadi pusat perhatian publik. Baliho merupakan media promosi yang memiliki banyak keunggulan. Ukurannya yang besar, memaksa para pengguna jalan untuk melihat dan memperhatikannya. Penempatan baliho di lokasi yang strategis pastinya akan menjadi media promosi yang tak terhindarkan. Selain itu, pesan pada baliho dibuat secara sistematis dan fokus, sehingga masyarakat mendapat pesan yang ingin disampaikan meski dalam waktu yang singkat.

Namun, menurut Firman, pada musim kampanye atau event lain, perang baliho antar politikus akan menjadi kejenuhan bagi masyarakat. Pesan yang ada pada baliho memang tersampaikan kepada masyarakat, namun persepsi yang masuk bisa saja bersifat negatif. Masyarakat akan merasa muak melihat baliho yang tersebar dimana-mana dan secara sadar memilih bersikap sebaliknya dari tujuan baliho.

Dikutip dari artikel Tempo.co, dalam periode Pemilu 2024 banyak sekali penempatan atau pemasangan baliho kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menimbulkan banyak dampak seperti:

- Polusi visual, Terlalu banyaknya pemasangan baliho di sembarang tempat dapat dibidang merusak keindahan pemandangan kota sehingga menjadi kotor. Polusi visual dapat merugikan tatanan lingkungan dan kesejahteraan manusia karena telah mengganggu ketenangan dan merusak nilai estetika. hingga bahkan bisa saja dapat mempengaruhi kesehatan mental.
- Seorang pengendara motor di wilayah Jakarta Barat dalam sebuah video jatuh karena tertimpa sebuah baliho.
- Menutupi tempat usaha warga, seorang pemilik toko geram karena spanduk dan baliho yang menutupi tempat usahanya.

Terdapat banyak aksi oleh masyarakat yang mencoba untuk menyemprotkan cat ke alat peraga kampanye seperti baliho yang sengaja dipasang di sekitar pepohonan. Masyarakat menuliskan “Tersangka Penusukan Pohon” pada alat peraga kampanye yang nekat melanggar karena muak kepada mereka yang telah berusaha merusak lingkungan.

Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan kasus - kasus tersebut, dapat kita sadari bahwa pengimplementasian Pancasila terutama sila kedua Pancasila dalam penggunaan baliho untuk kampanye politik masih belum terlaksana dengan benar. Sebagaimana yang kita tahu nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu, keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri. Keadaban

mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban.

#### **D. Penggunaan Baliho dalam Konteks Sosial dan Politik**

Penggunaan baliho dalam konteks sosial dan politik sangat relevan dalam menyampaikan pesan, mempromosikan kandidat politik, atau mengadvokasi suatu isu.

Menurut sumber yang peneliti temukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan baliho terhadap pilihan politik masyarakat kelas menengah di Kota Makassar, pentingnya penggunaan baliho sebagai media promosi untuk kandidat kepala daerah bagi masyarakat kelas menengah di Kota Makassar, dan respons masyarakat kelas menengah terhadap penggunaan baliho.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat kelas menengah tidak sepenuhnya bergantung pada baliho. Sebanyak 50% informan mengatakan bahwa pilihan politik mereka dipengaruhi oleh rekam jejak, kemampuan, dan prestasi kandidat, bukan hanya berdasarkan baliho. Selain itu, 41.66% informan menyarankan agar kandidat lebih baik berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membangun komunikasi dua arah, dan 33.33% menyarankan kandidat lebih baik menggunakan media sosial dan televisi untuk mempromosikan diri mereka.

#### **E. Implikasi Praktis**

Implikasi temuan penelitian terhadap praktik kampanye politik dan penggunaan media lainnya dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila dapat diuraikan dalam beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa implikasi potensial berdasarkan pemahaman umum terhadap dinamika politik, media, dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks Indonesia (Wibowo, 2021):

- **Penguatan Narasi Inklusif:** Penelitian dapat menunjukkan pentingnya menggunakan narasi yang inklusif dan mengedepankan nilai-nilai universal Pancasila dalam kampanye

politik. Ini berarti bahwa praktik kampanye harus menghindari ujaran kebencian, segregasi, atau diskriminasi, dan sebaliknya, mempromosikan persatuan, keadilan sosial, dan kesetaraan.

- **Edukasi Politik Berbasis Nilai:** Implikasi lain adalah kebutuhan untuk menyematkan nilai-nilai Pancasila dalam materi edukasi politik yang disebarluaskan melalui media. Ini dapat berupa konten yang mendidik pemilih tentang pentingnya demokrasi, persatuan, dan keberagaman, serta cara-cara berpolitik yang etis dan bertanggung jawab.
- **Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab:** Temuan penelitian dapat menggarisbawahi pentingnya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dalam kampanye politik. Media sosial harus digunakan untuk mempromosikan dialog yang konstruktif, menyebarkan informasi yang akurat, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, bukan untuk menyebarkan hoaks atau memecah belah masyarakat.
- **Strategi Komunikasi yang Berorientasi Pada Nilai:** Penelitian dapat mengindikasikan bahwa strategi komunikasi dalam kampanye politik harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, pesan-pesan kampanye harus mencerminkan semangat kebhinekaan, keadilan sosial, dan demokrasi. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai tersebut dan bagaimana menerapkannya dalam praktik politik sehari-hari.
- **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Politik:** Implikasi penting lainnya adalah peran pendidikan politik dalam memberdayakan masyarakat. Kampanye dan penggunaan media lainnya harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara yang bertanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- **Pengawasan dan Regulasi Media:** Temuan penelitian mungkin menyarankan perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap konten politik di media, khususnya media sosial, untuk

mencegah penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian yang bisa mengancam nilai-nilai demokrasi dan kolaborasi antara Pemerintah, Media, dan Masyarakat Sipil: Akhirnya, temuan tersebut dapat menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kampanye politik dan penggunaan media.

Implikasi ini membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk partai politik, kandidat, media, regulator, dan masyarakat umum, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terus menjadi fondasi dalam praktik politik dan penggunaan media di Indonesia.

## **F. Strategi Mengatasi Kendala dan Tantangan**

Penggunaan baliho sebagai media kampanye memiliki beberapa kendala dan tantangan, seperti biaya tinggi, efektivitas yang diragukan di era digital, proses perizinan rumit, risiko vandalisme, dan dampak lingkungan. Sebuah jurnal berjudul "The Effectiveness of Billboard Advertising in the Digital Age" oleh Smith et al. (2023) menemukan bahwa efektivitas baliho menurun dan kandidat/partai politik perlu mempertimbangkan alternatif.

Untuk mengatasinya, strategi seperti penggunaan selektif, desain kreatif, kombinasi media, dan pertimbangan alternatif perlu dilakukan. Dengan strategi yang tepat, baliho masih bisa menjadi media kampanye yang efektif di era digital. Berikut beberapa cara mengatasi kendala dan tantangan terhadap penggunaan baliho.

Untuk menjelaskan strategi dalam mengatasi kendala dan tantangan dalam menggunakan baliho sebagai media kampanye, terkait dengan Sila Kedua Pancasila yang menekankan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" ada beberapa poin pembahasan yaitu:

- **Penggunaan Selektif**

Memilih lokasi pemasangan baliho dengan bijak, menghindari penempatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal ini mencerminkan sikap adil dalam memberikan

ruang bagi kepentingan bersama dan beradab dalam mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

- **Desain Kreatif**

Menghadirkan baliho dengan desain yang kreatif dan menarik, yang tidak hanya memberikan informasi kampanye tetapi juga memberikan nilai estetika dan keindahan pada lingkungan sekitar. Strategi ini mencerminkan keinginan untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun lingkungan yang beradab dan memperkuat rasa kebersamaan.

- **Kombinasi Media**

Mengintegrasikan penggunaan baliho dengan media lain seperti media sosial atau iklan digital untuk mencapai audiens yang lebih luas dan efektif. Hal ini mencerminkan semangat inklusif dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama, sekaligus menunjukkan keterbukaan terhadap kemajuan teknologi dalam mendukung komunikasi politik yang adil dan beradab.

- **Pertimbangan Alternatif**

Mempertimbangkan alternatif lain dalam penggunaan media kampanye selain baliho, seperti iklan televisi, radio, atau kampanye daring. Strategi ini menunjukkan sikap fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan zaman serta kesadaran akan pentingnya berinovasi demi kepentingan bersama yang adil dan beradab.

Dengan mengatasi kendala dan tantangan tersebut, baliho masih dapat menjadi media kampanye yang efektif, terutama jika digunakan secara selektif dan kreatif (Prawira, 2021).

## **G. Evaluasi Penggunaan Baliho dalam Persepsi Sila Kedua Pancasila**

Dalam mengevaluasi penggunaan baliho sebagai media kampanye dalam konteks Sila Kedua Pancasila, penting untuk mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Penempatan baliho

yang dilakukan secara sembarangan dan tanpa izin dapat dilihat sebagai sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Penelitian oleh Hakim (2021) menyoroiti dampak negatif dari penempatan baliho yang tidak sesuai aturan, termasuk pencemaran lingkungan dan potensi bahaya bagi masyarakat.

Analisis terhadap sejauh mana penggunaan baliho mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku merupakan langkah penting dalam evaluasi ini. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta mencari solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Studi oleh Tim Kompasiana memberikan wawasan tentang berbagai pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan baliho sebagai media kampanye, yang dapat menjadi dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap kepatuhan terhadap aturan.

Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan baliho. Dampak tersebut dapat mencakup polusi visual, pencemaran lingkungan, dan bahkan risiko kecelakaan bagi masyarakat. Evaluasi terhadap dampak-dampak ini dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi-solusi yang dapat mengurangi risiko dan merugikan dari penggunaan baliho sebagai media kampanye. Penelitian oleh Lukmanul Hakim (2021) menggambarkan beberapa contoh dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan baliho yang tidak terkontrol.

Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap penggunaan baliho sebagai media kampanye dalam konteks Sila Kedua Pancasila, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dapat melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, praktisi kampanye, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang lebih ketat dan pelaksanaan yang lebih efektif terkait dengan penggunaan baliho sebagai media kampanye.

## **H. Peran Evaluasi terhadap Penggunaan Baliho dalam Perbaikan Kebijakan**

Evaluasi terhadap penggunaan baliho sebagai media kampanye yang diarahkan untuk memperkuat fondasi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran akan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, penggunaan baliho yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut dalam praktek kehidupan politik dan sosial. Dengan memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan melalui baliho tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, penelitian ini dapat membantu memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menginternalisasi prinsip-prinsip moral dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat (Rahman, 2019).

Sebagai bagian dari evaluasi terhadap penggunaan baliho, perlu diperhatikan bahwa konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila bukan hanya tentang konten pesan, tetapi juga termasuk dalam aspek-aspek teknis penggunaan media tersebut. Misalnya, penempatan baliho yang melanggar regulasi atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dapat dianggap tidak konsisten dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab. Dengan demikian, evaluasi ini bukan hanya menilai aspek moral pesan kampanye, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari penggunaan baliho (Arief, 2020). Penggunaan baliho yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai dampak sosial yang negatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menyatakan keprihatinan mereka atas beredarnya spanduk bermuatan SARA (Suku Agama Ras Antargolongan) yang dianggap menyerang salah satu pasangan calon dalam Pilkada Depok 2015 (Malau, 2015). Spanduk yang dimaksud adalah spanduk berisi tulisan 'Haleluya Puji Tuhan,

Sukseskan Satu Kelurahan Satu Gereja' dengan gambar latar belakang foto Dimas dan Babai. Pada contoh kasus di atas, penggunaan baliho politik tersebut tidak sejalan dengan Pancasila dimana di dalamnya terdapat aspek:

- Polarisasi Masyarakat, baliho politik dapat memecah belah masyarakat dengan narasi yang mengandung unsur SARA
- Merusak Toleransi Antar Umat Beragama, baliho politik yang mengaitkan suatu agama dengan narasi negatif atau menghasut perpecahan antar-agama, dapat merusak toleransi antar umat beragama.

Kasus lain terjadi di daerah Banyuwangi, dikutip dari detiknews, salah satu baliho bertuliskan 'Wong wedok iku nggone nang sumur, dapur dan kasur, gak dadi Bupati' (Perempuan itu tempatnya di sumur, dapur dan kasur. Tidak menjadi Bupati). Spanduk berlatar warna merah putih itu ditemukan di beberapa titik di Banyuwangi. Di antaranya di Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Glagah. Dalam spanduk tersebut tidak tercantum pembuat ataupun pemasangan (Fanani, 2020).

Penggunaan baliho ini sudah termasuk ke kampanye hitam dimana kampanye ini dilakukan untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif. Kampanye hitam merupakan ancaman serius bagi proses demokrasi yang sehat dan integritas pemilihan umum. Dengan cara ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek sehari-hari.

Selain itu, evaluasi terhadap penggunaan baliho yang memperkuat fondasi Pancasila juga dapat membantu memperbaiki dan mengembangkan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan menganalisis kesesuaian praktik kampanye politik dengan nilai-nilai Pancasila, pemerintah dan lembaga terkait dapat merumuskan regulasi yang lebih tepat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem yang mengatur penggunaan media kampanye secara lebih luas, sehingga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pelaku politik

selaras dengan prinsip-prinsip moral yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai ideologi negara.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap penggunaan baliho sebagai media kampanye yang memperkuat fondasi Pancasila memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran akan nilai-nilai dasar negara. Dengan memastikan bahwa penggunaan baliho tidak hanya konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga membantu mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini dapat menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat moralitas politik dan sosial di Indonesia.

## **I. Regulasi dan Kebijakan**

Analisis terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan baliho sebagai media kampanye merupakan aspek penting dalam evaluasi efektivitas dan dampak sosial dari praktik ini. Salah satu fokus utama adalah pemantauan dan penegakan hukum terhadap penempatan baliho yang sembarangan atau tanpa izin. Ini mencakup evaluasi terhadap keberhasilan pemerintah atau lembaga terkait dalam memantau dan menindak praktisi kampanye yang melanggar regulasi terkait. Studi oleh Sari, K. S., & Rahardjo, S. (2019) menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan efektif dalam mengatasi masalah penempatan baliho yang melanggar peraturan.

Selain itu, evaluasi juga harus mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan regulasi guna meminimalkan risiko sosial dan lingkungan yang terkait dengan penggunaan baliho. Ini mencakup analisis terhadap kebutuhan untuk memperketat persyaratan izin, menetapkan zona-zona khusus untuk penempatan baliho, dan mengatur batasan-batasan terhadap ukuran dan jumlah baliho yang dapat dipasang. Referensi jurnal lainnya yang relevan adalah penelitian oleh Marpaung, A. M., & Hadi, I. S. (2020) yang membahas tentang upaya perbaikan regulasi dan kebijakan terkait penggunaan baliho sebagai media kampanye guna mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Melalui analisis yang mendalam terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan baliho sebagai media kampanye, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan pengelolaan baliho yang lebih aman dan bertanggung jawab. Pemerintah perlu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi praktisi kampanye juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan regulasi yang berlaku serta mengurangi risiko pelanggaran dalam penggunaan baliho sebagai media kampanye. Beberapa kebijakan pemasangan baliho kampanye yang sering diatur dalam regulasi:

- Persyaratan Izin Pemasangan

Kebijakan ini mengatur bahwa praktisi kampanye harus memperoleh izin resmi dari pemerintah atau lembaga terkait sebelum memasang baliho kampanye di ruang publik. Persyaratan izin ini dapat mencakup prosedur pengajuan, biaya, dan ketentuan lain yang harus dipenuhi.

- Zonasi dan Lokasi Penempatan

Kebijakan ini menetapkan zona-zona khusus di mana baliho kampanye diperbolehkan dipasang, serta lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan baliho. Hal ini bertujuan untuk menjaga tata ruang kota dan menghindari gangguan terhadap keindahan lingkungan.

- Ukuran dan Desain Baliho

Kebijakan ini mengatur ukuran maksimal baliho yang diperbolehkan, serta desain dan konten yang diperbolehkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa baliho tidak mengganggu pemandangan, aman untuk dipasang, dan tidak mengandung konten yang provokatif atau menyesatkan.

- **Jangka Waktu Pemasangan**

Kebijakan ini menetapkan batas waktu atau periode tertentu di mana baliho kampanye diperbolehkan dipasang. Setelah periode tersebut berakhir, praktisi kampanye harus segera menghapus baliho mereka untuk menjaga kebersihan dan ketertiban ruang publik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam konteks kampanye politik, penggunaan baliho sebagai media promosi dan pencitraan politisi atau partai politik memiliki peran yang signifikan. Meskipun demikian, penggunaan baliho ini juga menimbulkan berbagai dampak sosial, lingkungan, dan bahkan politis. Evaluasi terhadap penggunaan baliho menunjukkan bahwa perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, strategi penggunaan baliho yang selektif, kreatif, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan efektivitasnya sebagai media kampanye politik.

Dampak sosial dan lingkungan dari penempatan baliho yang sembarangan atau melanggar regulasi menunjukkan perlunya perbaikan dalam regulasi dan kebijakan terkait. Hal ini mencakup peningkatan persyaratan izin, zonasi penempatan, pengaturan ukuran dan desain, serta batas waktu pemasangan. Kolaborasi antara pemerintah, praktisi kampanye, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan kampanye yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Pentingnya konsistensi penggunaan baliho dengan nilai-nilai Pancasila menegaskan perlunya edukasi politik yang lebih baik bagi masyarakat. Kampanye politik harus mengedepankan narasi inklusif dan mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, penggunaan baliho tidak hanya menjadi alat pencitraan politik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat fondasi moral dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implikasi temuan penelitian terhadap praktik kampanye politik dan penggunaan media lainnya menyoroti pentingnya pengawasan, regulasi, dan edukasi yang lebih baik dalam menyebarkan nilai-nilai

Pancasila. Melalui kerjasama antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat diciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan berintegritas, yang mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia.

Dengan demikian, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa penggunaan baliho sebagai media kampanye politik memerlukan pendekatan yang *holistic* dan berkelanjutan. Regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, edukasi politik yang lebih baik, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas dan keseimbangan dalam penggunaan baliho sebagai media kampanye politik Pemerintah

1. Perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penempatan baliho agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat persyaratan izin, menetapkan zona-zona khusus untuk penempatan baliho, serta mengatur ukuran dan desain baliho yang diperbolehkan.
2. Kerjasama antara pemerintah, praktisi kampanye, media, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat dan berintegritas. Kolaborasi ini dapat meliputi kampanye penyuluhan, diskusi publik, dan kegiatan-kegiatan lain yang memperkuat kesadaran politik masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan studi mengenai dampak sosial, lingkungan, dan kesehatan dari penempatan baliho kampanye yang tidak sesuai aturan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi negatif dari penyalahgunaan baliho sebagai media kampanye politik.
4. Bagi pembaca, agar lebih mempelajari adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur pemasangan baliho yang penting untuk

diimplementasikan dengan baik guna menjaga tatanan lingkungan dan ketertiban sosial.

## DAFTAR REFERENSI

- Aditya, R., & Pramudya, A. (2020). Kebijakan Pemasangan Baliho Kampanye dan Dampaknya terhadap Tata Ruang Kota: Studi Kasus Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah*, 5(1), 45-56.
- Ali, R. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Baliho Sebagai Media Penyebaran Informasi Politik Terhadap Perilaku Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 16(2), 103-112.
- Arief, B. (2020). "Evaluasi Dampak Lingkungan dari Penggunaan Media Kampanye Baliho: Perspektif Kebijakan Lingkungan." *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 7(2), 78-91.
- Astuti, W., & Yuniarti, E. (2018). Peraturan Daerah tentang Pemasangan Baliho Kampanye: Evaluasi Implementasi di Kota Yogyakarta. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 10(2), 123-134.
- Chaarnailan, M. R., Firdaus, I. M., & Nasution, A. M. (2018). Pencitraan Dalam Iklan Politik Partai Perindo Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hakim, Lukmanul. (2021). "Pengaruh Penempatan Baliho Kampanye Terhadap Citra Calon Pemimpin pada Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 5(2), hlm. 123-136.
- <https://news.solopos.com/perang-baliho-antar-politikus-bisa-bikin-masyarakat-jenuh1143770> diakses pada 3 maret 2024
- Marpaung, A. M., & Hadi, I. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemasangan Baliho Kampanye di Ruang Publik: Studi Kasus Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(3), 123-134.
- Mestika Zed. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pencarian dan Pengumpulan Data*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Prawira, D., & Wijaya, A. (2021). Strategi Penggunaan Baliho sebagai Media Kampanye dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Komunikasi Politik*, 8(2), 67-78.

- Purnengsih, I. A. (2017). Analisis Strategi Pemasaran Politik Dengan Media Iklan Bilyar Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia).
- Sari, K. S., & Rahardjo, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Baliho Kampanye di Ruang Publik: Studi Kasus Kota Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 104-114.
- Smith, A., et al. (2023). The Effectiveness of Billboard Advertising in the Digital Age. *Jurnal Penelitian Media Massa Indonesia*, 10(2), 112-125.
- Sumarsono, T. D., & Kusumaningrum, D. (2020). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan (JIPT)*, 8(1), 45-56.
- Tim Kompasiana. (2020). "Analisis Pelanggaran Aturan Penempatan Baliho Kampanye dalam Pemilu di Indonesia." *Jurnal Kompasiana*, Vol. 8(1), hlm. 45-58
- Rahman, A. (2019). "Peran Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Pendidikan Karakter Bangsa." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 23-34.
- Wibowo, Andika Prima. (2021). "Peran Media Sosial dalam Memasyarakatkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kampanye Politik: Studi Kasus Pemilu Umum Indonesia 2019." *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 18(1), hal. 45-58.
- Sagala, C. S. T., & Nasution, M. . Implementasi Pancasila di Tahun Politik. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 113–126. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.206>
- Fanani, A. (2020, November Senin). Bertebaran Spanduk Black Campaign di Banyuwangi yang Jatuhkan Salah Satu Paslon. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5247562/bertebaran-spanduk-black-campaign-di-banyuwangi-yang-jatuhkan-salah-satu-paslon>
- Malau, B. S. L. (2015, November Senin). KPU Depok Minta Polisi dan Panwaslu Usut Tuntas Spanduk Sara. *WartaKotalive*.

<https://wartakota.tribunnews.com/2015/11/09/kpu-depok-minta-polisi-dan-panwaslu-usut-tuntas-spanduk-sara>